

**Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Kawasan Banua Anam ditinjau  
Dari Aspek Ekonomi, Sosial, dan Anggaran**

*Analysis Of Development Inequality In Banua Anam Areas Viewed From  
Economic, Social, And Budget Aspects*

**Aldi\*, Ahmad Yunani**

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat  
\*Aldisaja98@gmail.com

**Abstract**

*The purpose of this study is (1) to find out the Development Inequality in the Banua Anam Region (2) See the Inequality in the Development of the Banua Anam Region (2) Which regency has the highest and lowest IPD. The method used in this research is quantitative descriptive analysis and Analysis of Development Planning Techniques. The results of the Tabalong and Balangan Research included developed but depressed areas for Tapin. Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, and Hulu Sungai Utara enter developed areas, including developing regions. Inequality in the Banua Anam region is still high; areas of increasing inequality are Tabalong and Balangan. Economic Aspects are the most dominant in creating imbalance. The highest Regional Development Indexes are Tabalong, Balangan, and Tapin,*

**Keywords:** *Development Inequality, Regional Development Index, Index Williamson, Klassen Typology, Human Development Index*

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Banua Anam (2) Melihat Ketimpangan Pembangunan Kawasan Banua Anam (2) Kabupaten mana yang memiliki IPD tertinggi dan Terendah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dan Analisis Teknik Perencanaan Pembangunan. Hasil Penelitian Tabalong dan Balangan termasuk daerah maju tapi tertekan, untuk Tapin. Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara masuk daerah maju berkembang termasuk daerah yang berkembang, Ketimpangan di kawasan Banua Anam masih tinggi, daerah ketimpangan yang meningkat adalah Tabalong dan Balangan. Aspek Ekonomi yang paling dominan dalam membuat ketimpangan. Indeks Pembangunan Daerah yang paling tinggi adalah Tabalong, Balangan, dan Tapin.

**Kata Kunci:** *Ketimpangan Pembangunan, Indeks Pembangunan Daerah, Indeks Williamson, Tipologi Klassen, Indeks Pembangunan Manusia*

## PENDAHULUAN

Ketimpangan Erat kaitannya dengan Pembangunan di suatu daerah. Sebenarnya pemerintah ingin memajukan pembangunan Ekonomi di suatu daerah atau negara, akan tetapi jika peningkatan pembangunan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu maka hal itu mengakibatkan pembangunan tidak merata dan belum sukses, karena salah satu syarat dari suatu pembangunan itu berhasil yakni ketimpangan yang rendah.

Ketimpangan bisa diakibatkan pula oleh perbedaan potensi antar daerah yang dimiliki baik potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia maupun infrastruktur yang ada di masing-masing daerah. Dengan perbedaan potensi antar daerah tersebut, maka ketimpangan antar daerah juga akan semakin besar. Ketimpangan harus segera diatasi karena dikhawatirkan ketimpangan yang semakin besar akan menimbulkan ketidakstabilan perekonomian. (Adi Sutrisno, 2010).

Berdasarkan penelitian Nurhuda Rahman, Muluk Khairu M.R., dan Prasetyo Yudo Wima (2013, 110) Untuk mengatasi Ketimpangan Pembangunan bisa dilakukan dengan cara perlunya sektor industri untuk mengalokasikan investasi ke daerah-daerah kabupaten, yang bisa berdampak ke pembangunan, Peningkatan pendapatan Asli Daerah Harus dilakukan Oleh Pemerintah, ditingkatkannya Pembangunan Manusia dengan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memecahkan masalah di atas maka tidak bisa menentukan bagaimana ketimpangan suatu daerah hanya melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita di daerah tersebut, oleh sebab itu peneliti membaginya menjadi tiga aspek untuk bisa melihat ketimpangan pembangunan tersebut, yaitu dari segi aspek Ekonomi, Sosial, dan Anggaran. Hasil Akhir yang ingin didapat adalah tidak ada ketimpangan yang terjadi dari Aspek Ekonomi, Sosial, dan Anggaran. Untuk itu penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis perencanaan pembangunan untuk melihat bagaimana ketimpangan di daerah tersebut.

Rumusan Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Daerah manakah yang masuk klarifikasi daerah maju pesat, Daerah berkembang dengan pesat, Daerah maju tapi tertekan, dan Daerah kurang berkembang pada Kabupaten Di kawasan Banua Anam? (2) Bagaimana Ketimpangan Pembangunan dilihat dari aspek Ekonomi, Sosial, dan Anggaran di Kawasan Banua Anam? (3) Bagaimana Indeks Pembangunan Daerah dilihat aspek Ekonomi, Sosial, dan Anggaran?

Tujuan Penelitian Ini adalah (1) Untuk Mengetahui Bagaimana Ketimpangan Pembangunan ditinjau dari aspek Ekonomi, Sosial, dan Anggaran yang ada di Kawasan Banua Anam (2) Melihat Ketimpangan Pembangunan di kawasan Banua Anam yang ditinjau dari Aspek Ekonomi, Sosial, dan Anggaran (3) Mengetahui Kabupaten mana yang memiliki nilai tertinggi dan juga terendah dari Indeks Pembangunan Daerah.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pembangunan Ekonomi**

Menurut Arsyad (2010, p. 374) Pembangunan Ekonomi Daerah adalah Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu hal yang berlangsung terjadi antara pemerintah dengan masyarakat memajemen sumberdaya di daerah dan antara pemerintah dengan masyarakat tertentu sebuah pola kemitraan yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk bisa melihat pembangunan daerah berhasil atau tidak perlu namanya sebuah tolak ukur yaitu pertumbuhan ekonomi, ketimpangan yang kecil dilihat dari penduduknya, daerah, dan antar daerah

### **Pertumbuhan Ekonomi Regional**

Pertumbuhan ekonomi regional adalah kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya serta berusaha meningkatkan kemampuan wilayah dalam menumbuh kembangkan wilayah tersebut berdasarkan kepada kemajuan teknologi dan kelembagaan, serta peran penting mendasarkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut pada potensi atau

sumber daya yang ada, pada suatu daerah dengan memasukkan unsur ruang atau *space* antar suatu wilayah dengan wilayah lain.

### **Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah**

Ketimpangan Pembangunan Daerah suatu hal yang bisa terjadi dalam proses pembangunan daerah. Ketimpangan yang terjadi didaerah dikarenakan oleh sumber daya yang dimiliki oleh daerah berbeda-beda, kondisi demografis yang tidak bisa disamakan. Dari perbedaan diatas mengakibatkan pembangunan didaerah tersebut harus sesuai dengan karakteristiknya. Dan ini tergantung dengan peran pemerintah setempat, apabila pemerintah bisa memanfaatkan kondisi daerah tersebut maka daerah tersebut bisa maju. Jika tidak bisa memanfaatkan maka daerah tersebut tidak bisa maju. Akibat dari ketimpangan Pembangunan daerah , hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat. (Sjafrizal,2008,p. 104).

### **Pengangguran**

Menurut Sukirno (2004,p. 28) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam suatu negara atau daerah yang masuk dalam angkatan kerja,tetapi masih belum mendapatkannya.

### **IPM**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM),atau dikenal dengan sebutan *human development index* (HTI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM adalah suatu indeks komposisi yang didasarkan pada tiga indikator, yakni: (a) kesehatan; (b) pendidikan yang dicapai; dan (c) standar kehidupan.

### **Kemiskinan**

Menurut (Iwan Nugroho dan Rochmin Dahuri,2004 p.165) Kemiskinan adalah keadaan seseorang atau suatu masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar sesuai yang berlaku dalam masyarakat tersebut seperti Tata Nilai

Norma baik itu secara alami atau pun sudah dibuat terstruktur. Apabila masyarakat atau seseorang tersebut pendapatannya rendah artinya masyarakat dianggap miskin sesuai dengan tata nilai norma yang berlaku.

### **Kesempatan Kerja**

Menurut Abbas (2011, p.30) Kesempatan kerja adalah penduduk yang bekerja yang sudah dihitung jumlahnya yang jika di implikasikan dalam kegiatan perekonomian yang mengalami peningkatan tenaga kerja, maka ini akan menjadi cerminan dari kesempatan kerja yang membuat terserapnya tenaga kerja dalam proses kegiatan ekonomi.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Menurut undang undang nomor 17 tahun 2003 APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Indeks Pembangunan Daerah**

Dalam penggunaannya IPR atau IPD mencoba mengukur kinerja pembangunan wilayah dalam berbagai dimensi. baik itu segi ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Tujuan dari Penyusunan IPR atau IPD ini adalah untuk mengukur pembangunan antar wilayah dan antar waktu dalam secara spesifik tujuannya yaitu: (1) Bagaimana tingkat pembangunan secara umum (2) Membanding kinerja pembangunan (3) Melihat perkembangan kinerja pembangunan antar waktu (4) Yang mana saja daerah-daerah yang memiliki kinerja pembangunan yang terbaik dan juga terburuk dari setiap dimensi pembangunan (5) Memberi kebijakan dari evaluasi yang dilihat dari IPD atau IPR

### **Penelitian Terdahulu**

Adi Sutrisno (2013) yang Berjudul “Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Pengembangan Sektor Unggulan di Kabupaten Dalam Kawasan Barlingmascakeb

tahun 2007-2010” Hasil penelitian Ketimpangan pendapatan di kawasan ini masih tergolong rendah.

Hj. Siti Mutmainah Zulfaridatul Yaqin , H. Ahmad Yunani , H. M . Anshar Nur (2018) yang berjudul “Pengaruh Anggaran Belanja, Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan” Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dengan menggunakan Williamson Index pada tahun tersebut mengalami penurunan yang berasal dari sektor pertambangan dan penggalian dan yang bukan berasal dari sektor pertambangan dan penggalian.

Lailatul Fitriyah (2013) yang Berjudul “Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah Serta Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Gerbangkertosusila Provinsi Jawa Timur” Terjadi ketimpangan pembangunan yang tinggi (mendekati 1) di Kawasan GERBANGKERTOSUSILA dan cenderung naik setiap tahunnya.

Rita Silva dan Alexandra Ferreira-Lopes (2013) yang berjudul “*A Regional Development Index for Portugal*” hasil penelitian perlunya kebijakan dalam daerah dalam pembangunan di daerah portugal.

## **METODE PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui ketimpangan pembangunan di daerah kawasan Banua Anam. yang terbagi menjadi 6 kabupaten, dan ketimpangan Pembangunan Ini dilihat dari aspek Ekonomi, Sosial, dan Anggaran. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Unit analisis di penelitian menggunakan data 7 tahun dari 2010-2017 yaitu PDRB, IPM, Gini Rasio, Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Harga konstan, Tingkat Kemiskinan, tingkat pengangguran, Kesempatan Kerja pendapatan perkapita dan APBD Kabupaten yang ada di kawasan Banua Anam.

## **Definisi Operasional Variabel**

### **Aspek Ekonomi**

#### ***Pertumbuhan Ekonomi***

Pertumbuhan ekonomi bisa dihitung dua cara yaitu dengan harga konstan dan harga berlaku. Harga konstan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak ada faktor inflasi, dan harga berlaku pertumbuhan ekonomi yang tidak ada faktor inflasinya.(Kuncoro,2014,p. 138).

#### ***Pendapatan Perkapita***

Pendapatan perkapita adalah yaitu alat ukur yang digunakan disuatu negara atau daerah tertentu yang digunakan untuk mengukur bagaimana suatu masyarakat di suatu negara atau daerah itu makmur dengan cara dilihat bagaimana pendapatan rata rata masyarakat tersebut.(Sukirno,2006,p. 11-12).

#### ***Produk Domestik Regional Bruto***

PDRB adalah jumlah total dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah yang berdasarkan dari jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tahun tertentu.

### **Aspek Sosial**

#### ***IPM***

Indeks Pembangunan Manusia (IPM),atau dikenal dengan sebutan *human development index* (HTI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia.

### ***Koefisien Gini***

Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

### ***Tingkat Pengangguran***

persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja

### ***Kemiskinan***

Menurut World Bank (2000), pengertian kemiskinan adalah Kesejahteraan yang menghilang, sedangkan menurut permasalahan kemiskinan adalah batasan-batasan tentang kesejahteraan itu sendiri.

### ***Kesempatan Kerja***

Kesempatan kerja disini adalah disini adalah persentase penduduk yang berkerja pada umur 15 tahun keatas yang sudah menjadi bagian angkatan kerja.

### ***Aspek Anggaran***

#### ***Anggara Pendapatan Belanja Daerah***

Menurut undang undang nomor 17 tahun 2003 APBD rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang dilihat adalah bagaimana Pendapatan Asli Daerah di kabupaten kawasan Benua Anam.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Yaitu data yang didapat dari instansi pemerintah atau dari lembaga statistik yang ada di suatu daerah. Data ini bisa berbentuk dokumentasi, laporan, atau bentuk file digital yang telah tersedia,

## **Teknik Analisis Data**

### ***Analisis Deskriptif***

Penelitian ini, setelah melakukan pengumpulan data, maka data dianalisis dengan analisis deskriptif serta analisis perencanaan pembangunan. Analisis deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk menjelaskan Ketimpangan Pembangunan dalam Aspek Ekonomi, Sosial, dan Anggaran.

### ***Analisis Perencanaan Pembangunan***

Analisis perencanaan pembangunan yaitu dengan indeks Williamson, Tipologi Klassen, dan Pembuktian Kuznetz. Dan Indeks Pembangunan Daerah

#### *Indeks Williamson*

$$Cv_w = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - \bar{y})^2 f_i / n}{\bar{y}}}$$

Keterangan

CV<sub>w</sub>= Indeks Williamson

F<sub>i</sub> = Jumlah penduduk kabupaten/kota ke-I (jiwa)

N = Jumlah Peduduk Kawasan Banua Anam

Y<sub>i</sub> = PDRB per kapita Kabupaten/kota ke I (Rupiah)

Y = PDRB Per kapita rata-rata Kawasan Banua Anam

#### *Indeks Pembangunan Daerah*

$$I_{in} = \frac{X_{NI} - X_{MIN}}{X_{MAX} - X_{MIN}} \times 100$$

Keterangan:

I<sub>in</sub>= dimensi indeks

X<sub>ni</sub>= nilai sekarang

Xmax= nilai maksimum

Xmin=nilia minimum

## HASIL DAN ANALISIS

### **Pola Pembangunan Dikawasan Banua Anam**

#### ***Pendapatan Perkapita dengan Pertumbuhan Ekonomi***

Periode pertama di tahun 2010- 2013 Kabupaten yang menjadi daerah maju adalah kabupaten Balangan hal ini dikarenakan pada tahun 2010- 2013 rata ratanya adalah 7,39 persen dan untuk pendapatan perkapitanya adalah Rp 59.661.342,8 hal tersebut lah yang membuat Balangan menjadi kabupaten yang maju di periode tahun 2010-2013, selanjutnya kabupaten yang termasuk daerah maju tapi tertekan adalah Tabalong, yang dimaksud dari daerah maju tapi tertekan adalah pertumbuhan yang lebih rendah akan tetapi pendapatan perkapitanya tinggi. Yang ini bisa di indikasikan pertumbuhan ekonomi rata rata dari Tabalong pada periode 2010-2013 termasuk golongan rendah yaitu 5,71 persen akan tetapi pendapatan perkapitanya tertinggi kedua setelah Balangan yaitu dengan rata rata sebesar Rp 49.898.158,3.

Kabupaten Tabalong antara pendapatan perkapita dengan pertumbuhan ekonomi tidak terjadi kesesuaian walaupun pendapatan perkapita tinggi akan tetapi di Tabalong tidak menaikkan pertumbuhan ekonomi. selanjutnya daerah yang termasuk berkembang adalah kabupaten Tapin. Arti dari daerah berkembang ini adalah pertumbuhan ekonomi termasuk tinggi akan tetapi tingkat pendapatan perkapitanya rendah. Ini tercermin pada rata rata pertumbuhan ekonomi Tapin sebesar 6,20 persen dan pendapatan perkapita sebesar Rp 25.874.726,4. Selanjutnya kabupaten yang termasuk daerah tertinggal pada periode 2010-2013 adalah Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara. Alasan tiga kabupaten ini di termasuk dalam kabupaten yang tertinggal karena pertumbuhan ekonomi yang rendah dan juga di ikuti pendapatan perkapita yang rendah membuat daerah tersebut disebut daerah tertinggal.

Periode tahun 2014-2017 terjadi. Untuk daerah yang maju di periode ini tidak dikarenakan terjadinya penurunan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk daerah masuk maju tertekan adalah kabupaten Balangan dan Tabalong, yang asalnya Balangan termasuk daerah maju dikarenakan terjadi penurunan rata rata pertumbuhan ekonomi dari 7,39 persen menjadi 3,45 persen mengakibatkan balangan menjadi daerah maju tertekan akan tetapi pendapatan perkapita terus meningkat signifikan dan ini berlaku juga dengan tabalong yang pertumbuhan ekonomi yang rendah tapi pendapatan perkapita masih meningkat.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara Mengalami peningkatan yang signifikan akan tetapi pendapatan perkapitanya masih rendah pada periode 2014-2017 Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara termasuk daerah berkembang, untuk kabupaten Tapin termasuk kabupaten masih berkembang selama 7 tahun.

#### ***Pertumbuhan ekonomi dengan IPM***

Periode 2010-2013 kabupaten yang masuk menjadi daerah maju adalah kabupaten Tapin dikarenakan Tapin memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dengan rata-rata IPM yang termasuk tinggi meskipun tidak setinggi Tabalong, dan alasan Tabalong menjadi kabupaten maju tertekan akibat dari pertumbuhan ekonomi yang rendah akan tetapi IPM di daerah tersebut termasuk tinggi lebih dari Tapin. Berikutnya Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga termasuk daerah yang maju akan tetapi tertekan hal ini dindikasikan bahwa dalam pembangunan manusia Hulu Sungai Selatan dan Tabalong termasuk maju tapi tidak di iringi dengan kemajuan dari pertumbuhan ekonomi di kedua daerah tersebut.

Balangan Termasuk daerah berkembang, meskipun dalam pola pembangunan antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan perkapita Balangan Termasuk daerah maju, hal ini dikarenakan IPM Balangan rendah tapi pertumbuhan ke ekonominya sangat tinggi dari daerah yang lain, yang artinya kesejahteraan di daerah tersebut masih kurang walaupun ekonominya maju. daerah yang masuk terkebelakang adalah kabupaten Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Selatan, walaupun Hulu Sungai Selatan Memiliki IPM yang termasuk tinggi tetapi Pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut tidak mendukung karena rendah. Hulu

Sungai Utara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah dan IPM yang rendah hal ini mengindikasikan bahwa Hulu Sungai Utara termasuk daerah yang Kesejahteraan yang rendah.

Periode tahun 2014-2017 terjadi pergeseran yang signifikan untuk daerah yang maju terdapat 3 kabupaten yaitu Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. Alasan 3 kabupaten tersebut termasuk daerah maju dikarenakan daerah tersebut mengalami peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi dan juga IPM. Tabalong selama 7 tahun termasuk daerah maju akan tetapi tertekan, dikarenakan Pertumbuhan ekonomi yang rendah akan tetapi IPM di daerah tersebut tinggi bisa diartikan bahwa Kesejahteraan masyarakat di Tabalong sangat tinggi tetapi Ekonomi di daerah tersebut terjadi kelesuan.

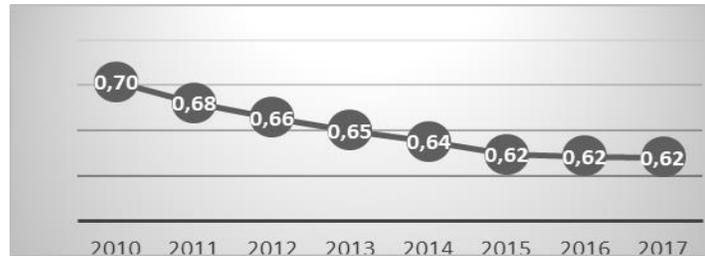
Hulu Sungai Utara di periode 2014-2017 Hulu Sungai Utara termasuk daerah berkembang hal ini karena pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut meningkat, walaupun IPM masih rendah yang berarti terjadi peningkatan kegiatan ekonomi di daerah Hulu Sungai Utara akan tetapi tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan di masyarakat tersebut. Terakhir daerah yang termasuk tertinggal adalah Balangan karena pertumbuhan ekonomi yang rendah akan tetapi IPM yang tinggi, yang berarti walaupun ekonomi lesu akan tetapi kesejahteraan di daerah tersebut termasuk tinggi.

### **Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kabupaten Kawasan Banua Anam Dditinjau dari Aspek Ekonomi, Sosial, dan Anggaran**

#### ***Aspek Ekonomi***

Kawasan Banua Anam termasuk ketimpangan yang tinggi, walaupun terjadi penurunan yang hanya sebesar 1 persen. Penurunan tersebut dimulai pada tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa Ketimpangan masih terjadi di Banua Anam. Dari perhitungan indeks Williamson antar kabupaten yang dikawasan Banua Anam, terlihat bahwa Ketimpangan cenderung meningkat adalah kabupaten Balangan dan Tabalong. Hal ini dikarenakan kedua kabupaten tersebut dominan Tambang. Hal tersebut bisa dilihat dari PDRB yang begitu tinggi dari dua kabupaten

tersebut melebihi dari kabupaten dikawasan Banua Anam yang lain. Untuk daerah yang paling rendah ketimpangannya adalah kabupaten Tapin dikarenakan Tapin sektor Tambang di tapin tidak begitu besar dan di kabupaten Tapin pertanian termasuk sektor pendukung dalam meningkatkan PDRB sehingga ketimpangan di daerah tersebut rendah.



**Gambar 1**

**Indeks Williamson Kawasan Banua Anam Periode 2010-2017**

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tengah, dan Utara Ketimpangan mengalami penurunan sedikit demi sedikit setiap tahunnya akan tetapi jika dilihat dari segi PDRB tiga kabupaten Hulu Sungai tingkat PDRB termasuk rendah, hal ini karena tiga kabupaten tersebut tidak bertumpu kepada sektor tambang, meskipun tidak bertumpu pada sektor tambang, sektor sektor lain yang ada di 3 kabuapten hulu sungai tidak lah berkembang sehingga peningkatan PDRB hanya sedikit. Selanjutnya dilihat dari segi Pertumbuhan Ekonomi Tabalong dan Balangan mengalami penurunan akan tetapi kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tengah, dan Utara cenderung meningkat. Menurut

Segi pendapatan perkapita, secara keseluruhan pendapatan perkapita dari rata rata selama 2010-2017 pendapatan perkapita yang paling tinggi adalah Balangan dan yang paling rendah adalah Hulu Sungai Utara. Alasan mengapa hulu sungai utara yang paling rendah dikarenakan hulu sungai masih mengandalkan sektor pertanian dan di iringi oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Jika dilihat dari pendapata perkapita bisa dilihat bahwa Kabupaten Balangan pendapatan perkapitanya dengan pendapatan perkapita HSU pada tahun 2017 perbedaannya adalah 4,3 kali lipat lebih besar yang ini mengindikasi ketimpangan terjadi.

**Tabel 1**  
**Pembuktian Hipotesis Kuznetz Kabupaten Kawasan Banua Anam 2010-2017**

Tapin	Tidak Terbukti
Hulu Sungai Selatan	Tidak Terbukti
Hulu Sungai Tengah	Tidak Terbukti
Hulu Sungai Utara	Tidak Terbukti
Tabalong	Tidak Terbukti
Balangan	Tidak Terbukti

*Sumber: data diolah, 2019*

Kabupaten kawasan Banua Anam hipotesis Kuznetz tidak berlaku karena apabila pendapatan perkapita naik maka ketimpangan Menurun. berarti ketimpangan di kabupaten Kawasan Banua Anam masih terjadi. Untuk daerah yang pendapatan perkapita yang tinggi akan tetapi ketimpangannya tinggi terjadi pada kabupaten Tabalong dan Balangan. untuk kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara mengalami penurunan ketimpangan.

### *Aspek Sosial*

**Tabel 2**  
**Indeks Gini Kabupaten Kawasan Banua Anam**

Kabupaten	Gini Ratio							
	2017 Tahunan	2016 Tahunan	2015 Tahunan	2014 Tahunan	2013 Tahunan	2012 Tahunan	2011 Tahunan	2010 Tahunan
Tapin	0.331	0.321	0.345	0.26	0.279	0.295	0.258	0.286
Hulu Sungai Selatan	0.336	0.355	0.312	0.269	0.264	0.295	0.345	0.229
Hulu Sungai Tengah	0.302	0.272	0.327	0.279	0.301	0.31	0.29	0.247
Hulu Sungai Utara	0.309	0.318	0.359	0.266	0.259	0.293	0.283	0.252
Tabalong	0.328	0.316	0.285	0.297	0.332	0.327	0.345	0.269
Balangan	0.411	0.333	0.403	0.247	0.304	0.329	0.308	0.259

*\*Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2019*

Selama 7 tahun indeks gini di kabupaten Kawasan Banua Anam tidak mengalami penurunan yang signifikan jika dilihat secara satu kawasan. Indeks gini paling rendah terjadi pada tahun 2014 yaitu dengan rata rata sebesar 0.270 di kawasan Banua Anam. Dan yang paling tinggi ditahun 2015 yaitu dengan rata rata sebesar 0.339. ketimpangan yang terjadi dibanua anam masih berlanjut dikarenakan kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan dilakukan pemerintah masih belum efektif terlaksana untuk menaikkan pendapatan masyarakat didaerah tersebut .

Kawasan Banua Anam semakin tinggi dari IPM maka ketimpangan di kawasan Banua Anam juga meningkat. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang ada di kawasan Banua Anam terjadi penurunan. Walaupun kabupaten hulu sungai selatan, hulu sungai tengah, hulu sungai utara, dan tapin pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan tapi peningkatan tersebut tidaklah begitu besar dan tidak berdampak kepada ketimpangan pendapatan, dan juga IPM yang meningkat akan tetapi tidak didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tidak bisa menurunkan ketimpangan.

Perkembangan dari 2010-2017 Pengangguran di kawasan banua Anam termasuk tinggi pada tahun 2010-2013 akan tetapi terjadi penurunan ditahun 2013-2014 dan ini di iringi dengan indek Gini yang menurun akan tetapi pada tahun 2015 Pengangguran naik dari 2.89 menjadi 3.59, indek gini pun ikut naik juga dari 0.27 ke 0.34 dan ditahun 2016-2017 karena Pengangguran bertahan di angka 3 persen maka indeks gini bertahan pada 0,3 persen. hal ini mengindikasikan bahwa apabila ketimpangan turun mengakibatkan pengangguran juga turun juga, dan apabila ketimpangan naik maka pengangguran akan naik juga.

Tujuh tahun kesempatan kerja di kawasan Banua Anam Sangatlah tinggi. dan juga tidak terjadi ketidak seragaman selama 7 tahun. Menurut hasil penelitian (Nurmanaf,1998) apabila kesempatan kerja tidak bervariasi berarti program pembangunan di daerah daerah tersebut tidaklah memiliki perbedaan, Dan juga alasan kawasan Banua Anam memiliki kesempatan kerja yang tinggi berdasarkan ini didasari dengan indeks gini termasuk dalam ketimpangan rendah. Jadi dalam selama 7 tahun ini di kabupaten kawasan Banua Anam apabila dilihat dari kesempatan kerja antar kabupaten tidak lah terjadi ketimpangan.

### ***Aspek Anggaran***

Menurut penelitian (Nurhada,dkk ,2011) apabila PAD meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat sehingga ketimpangan menjadi turun. Sebagai berikut Tabel PAD, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan Pembangunan.

**Tabel 3**  
**PAD, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Williamson Kabupaten Kawasan Banua Anam 2010-2017**

Tahun	PAD	Pertumbuhan Ekonomi	IDW
2010	Rp26,314,084,589.67	5.15	0.7
2011	Rp31,234,055,799.81	6.74	0.68
2012	Rp36,745,218,826.46	5.65	0.66
2013	Rp48,102,993,213.92	5.83	0.65
2014	Rp81,902,375,575.69	5.45	0.64
2015	Rp86,689,638,000.41	4.40	0.62
2016	Rp64,939,693,176.53	4.60	0.62
2017	Rp102,105,120,957.02	4.91	0.62

*Sumber: BPS dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (data diolah), 2019*

Tabel 3 diatas yang mengakibatkan penurunan ketimpangan di kawasan Banua Anam adalah Pendapatan Asli Daerah, meskipun pertumbuhan ekonomi di kawasan Banua Anam mengalami penurunan akan tetapi Pendapatan Asli Daerah di kawasan Banua Anam terus mengalami kenaikan, PAD yang meningkat mengakibatkan penurunan ketimpangan walaupun yang ketimpangan yang turun hanya 1 persen. hal itu disebabkan dari Anggaran yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas aktivitas sektor yang ada didaerah tersebut

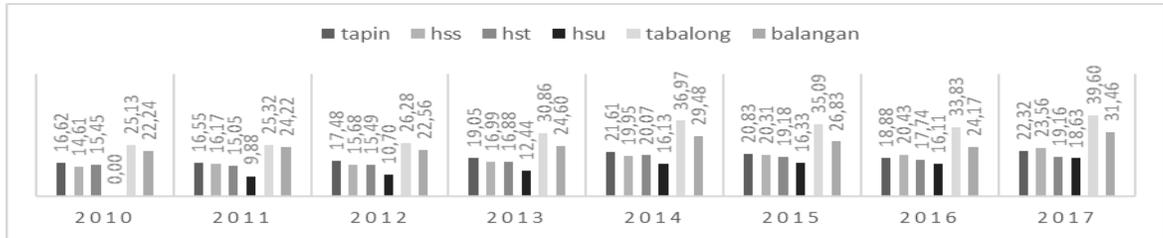
**Tabel 4**  
**Rata Rata PAD Kabupaten Kawasan Banua Anam 2010-2017**

Kabupaten	Rata RATA PAD 2010-2017
Tapin	Rp40,530,002,115.28
Hulu Sungai Selatan	Rp62,275,459,513.88
Hulu Sungai Tengah	Rp57,122,866,501.22
Hulu Sungai Utara	Rp67,186,142,361.71
Tabalong	Rp89,033,190,001.06
Balangan	Rp42,377,224,611.49

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (data diolah), 2019*

Temuan dari Tabel 5.26 adalah meskipun Balangan merupakan dominan dari segi PDRB dan pendapatan Perkapita akan tetapi PAD didaerah tersebut masih cukup rendah, begitu juga Tapin. meskipun kedua termasuk dominan Tambang akan tetapi PAD didaerah tersebut cukup rendah Rata ratanya dibanding dengan daerah lain. Sehingga ini menjadi perhatian pemerintah dalam peningkatan PAD di kabupaten Tapin dan Balangan. Dan juga ini mengindasikan bahwa tingkat pemasukan pajak ,retribusi,dan pendapatan lainnya di daerah tersebut

sangat kurang. Faktor lain yang menyebabkan PAD Balangan begitu rendah dikarenakan Pajak didaerah tersebut mengalir ke pusat yang mengakibatkan daerah tersebut PAD nya termasuk rendah, hal ini terjadi juga di Tapin, ini mengindikasikan bahwa Balangan dan Tapin belum maksimal dalam memungut PAD.



**Gambar 2**  
**IPD Kabupaten Kawasan Banua Anam 2010-2017**

Tabalong dan Balangan selama tujuh tahun merupakan kabupaten yang dengan indeks pembangunan daerah yang tertinggi yaitu untuk Tabalong indeks pembangunan daerahnya sebesar 31.63 dan Balangan sebesar 25.69 dikarenakan dari indeks pembangunan daerah aspek ekonomi sangatlah tinggi ini didukung dari pendapatan perkapita dan PDRB di kedua daerah tersebut sangatlah tinggi dari kabupaten yang lain. Aspek Ekonomi ada 3 provinsi yang termasuk ekonomi tertinggi yaitu Tabalong, Balangan ,dan Tapin. Yang menyebabkan ketiga provinsi tersebut Indeks Pembangunan Daerahnya tinggi adalah pencapaian dari PDRB dan Pendapatan Perkapita yang sangat tinggi. selanjutnya tiga provinsi yang termasuk rendah adalah kabupaten Hulu Sungai Selatan,Hulu Sungai Tengah,dan Hulu Sungai Utara. Rendahnya ketiga daerah tersebut akibat dari rendahnya Pendapatan Perkapita dan PDRB daerah tersebut.

Aspek Sosial indeks pembangunan daerah yang di ukur dengan kesempatan kerja, membuat unsur IPM yaitu pendapatan di penduduk yang ada di daerah tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, meskipun dilihat dari kemiskinan masih tinggi, akan tetapi kesejahteraan tidak diukur dengan pendapatan saja akan tetapi dilihat unsur unsur yang lain seperti Rata-Rata Usia Harapan Hidup,Rata Rata lama sekolah, dan Angka Melek Huruf,

yang berarti jika dihubungkan antara IPM dan indeks pembangunan bahwa daerah kawasan Benua anam dilihat aspek sosial termasuk daerah yang kesejahteraannya sedang.

2010-2017 perkembangan Indeks Pembangunan Daerah aspek anggaran bervariasi, untuk kabupaten Tapin dan Balangan selama 7 tahun berturut turut kinerja dalam anggaran. Tabalong yang termasuk daerah Tambang akan tetapi daerah tersebut indeks pembangunan daerahnya dari tahun 2010-2012 termasuk dalam posisi rendah akan tetapi pada tahun 2013-2017, Tabalong menjadi daerah Indeks Pembangunan daerahnya termasuk tinggi. yang artinya Tabalong mengalami peningkatan dalam pemasukan dari pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah yang lainnya. Untuk Hulu Sungai Selatan, Tengah, dan Utara Indeks Pembangunan Daerah Aspek Anggaran Cenderung Meningkat dari tahun 2010-2017, hal itu terlihat dari kemandirian daerah tersebut yang berhasil dari pengumpulan pajak serta kesadaran pajak yang tinggi, diringi dengan retribusi daerah yang masuk dengan lancar dan juga ,pendapatan asli daerah yang lain terakumulasi agar tidak keluar daerah tersebut atau tidak terdata sehingga tidak masuk kedalam Pendapatan Asli daerah.

## **PENUTUP**

### **Implikasi Penelitian**

Aspek yang paling menyebabkan ketimpangan adalah ekonomi, dan Temuannya adalah dalam aspek anggaran pendapatan asli daerah di Balangan dan Tapin cukup Rendah. Pembangunan jika dilihat dari aspek Ekonomi, Sosial, dan Anggaran Tabalong dan Balangan yang paling tinggi.

### **Keterbatasan Peneliti**

Tahun yang akan diteliti perlu penambahan agar bisa melihat ketimpangan yang bisa dilihat, hal ini dikarenakan pada tahun 2010-2017 merupakan naiknya harga batubara. penelitian ini Sebatas aspek

ekonomi, sosial, dan anggaran padahal masih banyak lagi aspek aspek lain yang bisa mempengaruhi ketimpangan seperti Aspek Kesehatan.

### **Kesimpulan**

Pola pembangunan Untuk Kabupaten Balangan dan Tabalong merupakan daerah yang maju akan tetapi tertekan, dan untuk Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Tengah termasuk daerah berkembang, apabila dilihat dari pola pembangunan dengan ipm dan pertumbuhan ekonomi yang masuk daerah Maju adalah Hulu Sungai Tengah, Selatan dan Tapin, untuk maju tertekan adalah Tabalong, yang berkembang adalah Hulu Sungai Utara, dan untuk yang terkebelakang adalah Kabupaten Balangan paling berperan besar dalam ketimpangan adalah sektor ekonomi Indeks Pembangunan Daerah jika dilihat Aspek Ekonomi, Sosial, dan Anggaran. Ketimpangan juga terbukti di aspek ekonomi, daerah yang memiliki Indeks Pembangunan yang begitu tinggi adalah Balangan, Tabalong, dan Tapin. Dan untuk daerah Hulu Sungai Selatan, Tengah, dan Utara termasuk rendah. Pada indeks pembangunan keseluruhan. Pembangunan Daerah dilihat Tanpa Aspek Ekonomi, Hulu Sungai Selatan, Utara, dan Tengah mengalami peningkatan, dan Tabalong juga termasuk daerah yang Indeks Pembangunan Daerah yang tinggi. Balangan dan Tapin yang rendah, hal ini dikarenakan penyerapan PAD di daerah tersebut rendah.

### **Saran**

Pemerintah yang ada di kawasan Banua Anam perlulah meratakan pembangunan yang ada di masing masing daerah. Dengan cara melancarkan distribusi dengan cara pembangunan prasarana perhubungan yang memadai hal ini akan mempermudah Faktor Faktor produksi yang bisa dijangkau setiap daerah

Kebijakan pembangunan yang berfokus kepada Sarana dan prasaran ekonomi, dan juga untuk bisa meningkatkan Teknologi, SDM, dan Peningkatan

pendapatan, dan juga modernisasi Sektor Khususnya Pertanian. Daerah Tabalong, Tapin, dan Balangan haruslah mengembangkan sektor sektor yang lain tidak bertumpu kepada sektor tambang, sektor yang berpotensi di daerah tersebut adalah sektor pertanian.

Peningkatan pemerintah dalam pengumpulan pendapatan asli daerah harus dilakukan agar pendapatan di daerah tersebut tidaklah keluar daerah tersebut. pemerintah daerah perlu menentukan skala prioritas pembangunan dalam aspek ekonomi, sosial dan anggaran, agar bisa tercipta hubungan langsung antara kinerja dan pendanaan

### **Daftar Pustaka**

- Sutrisno, A. (2013). Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Pengembangan Sektor Unggulan Di Kabupaten Dalam Kawasan Barlingmascakeb Tahun 2007-2010. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 148–158. <https://doi.org/10.15294/edaj.v1i1.465>
- Nurhuda, R., Muluk, M. R. K., & Prasetyo, W. Y. (2011). ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). *Jurusan Administrasi Publik*, 1(4), 110–119.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Iwan, N., & Rokhmin, D. (2004). *PEMBANGUNAN WILAYAH PERSPEKTIF EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN*. (U. Yuwono, Ed.) (1st ed.). Jakarta: LP3ES Indonesia
- Sadono, S. (2006). *EKONOMI PEMBANGUNAN: PROSES, MASALAH, DAN DASAR KEBIJAKAN* (2nd ed.). Jakarta: Kencana.
- UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah. Reformasi, Perencanaan Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Sjafrizal, 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Baduose Media, Cetakan Pertama. Padang.
- Abbas, A.K., Lichtman, A.H. and Pillai, S., 2011. *Cellular and Molecular Immunology*. 7th ed. Saunders Elsevier.